



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, DAN GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHANES AVILLA ARI DARTOMO
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 209124

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m²/54 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
2. Tanah Seluas 167 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/65 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.220.000.000**

1. MOBIL, SUBARU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, AUDI A3 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, MAZDA CX 5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 345.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 17.823.368****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.688.359.052****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 150.000.000**

Sub Total **Rp. 7.981.182.420**



III. HUTANG

Rp. 312.354.054

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.668.828.366

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.